

BAB II

STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT PALEMBANG ABAD XX

A. Bidang Politik

Dalam pembahasan seorang tokoh ulama yang telah berperan penting di dalam mengembangkan ajaran Islam maka perlu juga membahas bagaimana struktur sosial politik masyarakat Palembang pada peralihan abad XIX dan abad XX, yang mencakup bidang politik, sosial, ekonomi, dan keagamaan. Hal ini mengingat bahwa kondisi sosial, politik, ekonomi, dan keagamaan sangat mempengaruhi pembentukan intelektual seorang tokoh, serta kaitannya dengan peranan seorang ulama di tengah-tengah masyarakat. Maka penulis melukiskan gambaran kehidupan sosial masyarakat Palembang dari berbagai aspek kehidupannya pada masa Keresidenan Palembang.

Memperhatikan penyebaran Islam dan proses Islamisasi di Palembang, Taufik Abdullah berpendapat bahwa proses Islamisasi di wilayah ini lebih tampak pada zaman Kolonial Belanda dari pada Zaman Kesultanan. Selain kehancuran hubungan antar daerah dan kota, keterlepasan dari kekuasaan sultan, merupakan salah satu faktor bagi perkembangan yang dimaksud. Selain peristiwa menteng tahun 1819 M, tidak pernah terjadi peristiwa pemberontakan dan peperangan yang melibatkan ulama Sumatera-Selatan sepanjang abad XIX dan awal abad XX. Hal ini menunjukkan bahwa para ulama bebas Sumatera-Selatan lebih berkonsentrasi pada kegiatan-kegiatan yang bersifat religius dan sosio kultural, tidak pada kegiatan politis. Mengabarkan kegiatan-kegiatan politik tersebut, mungkin dikarenakan para

ulama bebas lebih mementingkan pembinaan masyarakat melalui pengajaran dan dakwah Islam dan mungkin juga dilatar belakangi oleh kebebasan yang diberikan pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Dalam melaksanakan kegiatan pengajaran dan dakwah Islam, administrasi dan pembatasan yang diterapkan oleh penguasa kolonial mungkin masih di pandang wajar dan dapat di toleransi, karena terutama pada masa-masa awal, penguasa kolonial Belanda pada dasarnya hanya melanjutkan prinsip dan prosedur pengaturan Islam yang telah dijalankan penguasa kesultanan.¹

Namun dimasa-masa selanjutnya dibuatlah peraturan-peraturan mengenai pengajaran agama Islam, kebijaksanaan pengawasan terhadap pengajaran Islam pada dasarnya dimaksudkan untuk mengendalikan dan mencegah guru agama menjadikan lembaga pengajarannya sebagai sarana menghimpun kekuatan dalam membenci penguasa Belanda.² Peraturan dan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda yang berkenaan dengan urusan agama Islam. Pada awal abad XX, masih tampak sikap ragu-ragu sehingga lebih banyak membiarkan saja. Menjelang pertengahan abad XX, masih ada keraguan yang diiringi rasa takut terhadap ancaman Islam, sehingga muncul berbagai aturan yang ketat dan kadang-kadang terasa aneh dalam menghadapi urusan agama Islam.³ di dalam melakukan strategi untuk kepentingan politik dan pemerintahan kolonial terkadang Belanda menggunakan siasat yang licik untuk melemahkan kekuatan

¹ Zulkifli, *Ulama Sumatera-Selatan: Pemikiran dan Peranannya dalam Lintasan Sejarah*, (Palembang: Unsri, 1999), h. 80

² Husni Rahim, *Sistem Otoritas & Administrasi Islam Studi Tentang Pendapat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial Belanda*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), h. 164

³ Badri Yatim, *Sejarah Peradapan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 252

rakyat agar tidak terjadi pemberontakan. Tentunya hal pertama yang harus dilakukan Belanda adalah menyingkirkan terlebih dahulu ulama yang berperan penting dalam pengajaran Islam.

Di bidang politik, Keresidenan Palembang pada masa ini, ulama meneruskan tugasnya dalam pemerintahan, terutama para ulama yang langsung diangkat sebagai pegawai keresidenan Palembang, seperti para Penghulu Nata Agama dan jajarannya, yang ditugaskan oleh pemerintah Belanda sebagai anggota pengadilan adat, sebagai pemberi advis dalam soal-soal keagamaan, tetapi kemudian tidak dilibatkan lagi sebagai anggota pengadilan adat, kehadirannya hanya bila diperlukan ketika suatu perkara harus dilakukan sumpah di bawah alqur'an. Penempatan posisi-posisi ulama dalam pemerintahan memberikan peranan ulama penghulu beserta jajarannya dalam mempercepat perkembangan Islam ke daerah pedalaman, tetapi hal ini hanya menyentuh pada bagian kuantitas umat, sedangkan dalam bidang pemerintahan dan hukum adat kurang memberikan pengaruh-pengaruh yang dominan, kecuali dalam bidang hukum perkawinan dan warisan.⁴

Di masa awal kekuasaan colonial Hindia-Belanda setelah kesultanan Palembang dihapuskan, Palembang telah dijadikan daerah keresidenan yang dipimpin oleh seorang residen. Residen dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh asisten residen dan beberapa pejabat Belanda lainnya.

Jabatan yang masih disediakan untuk para pribumi antara lain:

⁴ Jeroen Peeters, *KaumTua-Kaum Mudo: Perubahan Religijs di Palembang (1821-1942)*, h.154

- a. *Rijksbestuurder* (Pangeran Kerama Jaya)
- b. *Ambtenaar bij den resident* (Pangeran Tumenggung Astra Menggala)
- c. *Hoofd der Politie* (Pangeran Tumenggung Kerta Menggala)
- d. Dan masih banyak lagi jabatan-jabatan yang lainnya.

Data di atas menunjukkan bahwa pemerintah kolonial masih menggunakan beberapa pejabat pribumi untuk ikut memimpin Palembang, walaupun dengan kadar kewenangan yang berkurang. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa perintah Belanda masih “*menghargai sistem kesultanan*”, di balik itu penunjukan tersebut dimaksudkan untuk menenangkan rakyat dan memudahkan pengendalian bila terjadi kerusuhan.⁵ Para ulama yang dianggap cukup berilmu, mengadakan perkumpulan yang di duga jaringan ulama yang pernah belajar di timur tengah, mereka membuat perkumpulan atau organisasi yang tujuannya mengembangkan Islam di Palembang, diantaranya adalah K.H. Abubakar Bastari yang melawan politik kolonial Hindia-Belanda melalui pendidikan, ia tidak mengajak rakyat untuk melawan penjajah dengan peperangan, tetapi cenderung memperbaiki mental spiritual masyarakat yang mengalami tekanan setelah kekalahan yang berkepanjangan.

Mereka yang di sebut ulama independent (ulama bebas), sama hal nya dengan ulama rakyat.⁶ yang selalu berada di tengah tengah masyarakat. Seperti. Ki Pedatukan, Ki Marogan dan K.H. Abubakar Bastari dan masih

⁵ Husni Rahim, *Sistem Otoritas & Administrasi Islam: Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, h. 83

⁶ Nor Huda. *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, (Jogjakarta: ar- Ruzz Media, 2007), h.221

banyak lagi ulama-ulama lainnya. Mereka inilah yang berkesinambungan memperjuangkan islam berkembang di Palembang dari masa-kemasa.

B. Bidang Sosial

Kondisi sosial budaya masyarakat Palembang pada masa kesultanan Palembang Darussalam dapat dikatakan sangat baik, karena dapat dilihat dari penggunaan bahasa di kehidupan sehari-hari. Sistem kekerabatan, organisasi sosial, sistem pengetahuan dan teknologi, perkembangan ini didukung oleh letak ibu kota kesultanan yang menghubungkan pedagang dari luar kesultanan. Dengan demikian dapat mempercepat dan memperluas tukar-menukar unsur sosial budaya antar bangsa. Pada masa perkembangan kesultanan Palembang, kondisi sosial budaya masyarakat Palembang dipengaruhi dua kebudayaan yang besar yaitu Melayu dan Jawa. Budaya Jawa dikenal oleh masyarakat Palembang sejak dibangunnya keraton Jawa yaitu dikenal dengan nama Keraton Kuto Gawang, letak Keraton Kuto Gawang ini berada ditepian sungai Ogan dan sungai Komering yang dilindungi oleh pulau kemarau sebagai basister⁷ tanah elit Jawa.⁸

Dengan dibangunnya Keraton Kuto Gawang sebagai basis pertama elit Jawa, maka mulai berbaurnya dua kebudayaan yang berbeda yaitu Melayu dan Jawa. Budaya Melayu yang ada pada masyarakat Palembang dipengaruhi oleh

⁷ Basister: Asas atau Dasar. Lihat Di Team Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. (Jakarta: Balai Pustaka), h. 111

⁸ Maskur, "Peranan Pangeran Keramo Jayo Selama Menjadi Pejabat Negara Palembang di Bawah Pemerintah Kolonial Belanda (1823-1853), *Skripsi*, (Palembang, Jurusan SKI Fak. Adab IAIN Raden Fatah), hlm. 29-30. Tidak Diterbitkan

kebudayaan Jawa yang sangat mendominasi. Pengaruh Melayu dan Jawa terhadap masyarakat Palembang, kita lihat dari segi bahasa yang digunakan masyarakat keraton. Masyarakat keraton menggunakan dialek Palembang yang diadaptasi dari kosa kata bahasa Jawa. Namun, kosa kata Jawa dengan dialek Palembang yang dipakai oleh masyarakat keraton tidak menjadi bahasa Palembang secara keseluruhan. Perbedaan bahasa ini merupakan hirarki sosial yang mempengaruhi semua aspek kehidupan sehari-hari.⁹

Hal tersebut untuk mencari adanya perbedaan sosial penggunaan bahasa Jawa yang dipakai oleh pembesar Palembang terutama ketika menghadap raja. Selain dari segi bahasa yang dipakai oleh masyarakat Palembang, ada juga pembagian kelas dalam masyarakat keraton, ini merupakan ciri khas dari masyarakat keraton Jawa. Dengan direbutnya keraton oleh pasukan Belanda tidak saja mempunyai dampak politik, tetapi juga mempunyai implikasi yang kuat untuk kebudayaan Keraton.

Palembang. Pertama-tama jatuhnya kesultanan juga mengakibatkan keruntuhan istana secara fisik, istana kerajaan langsung dimanfaatkan sebagai kediaman komisaris Belanda dan juga rumah-rumah pemilik kaum ningrat yang berdiri di dalam dan sekitar keraton disita sebagai kediaman untuk perwira Belanda. Sedangkan pasukan militer ditempatkan di dalam tembok keraton, kemudian dinding keraton yang tebal dibiarkan saja menjadi sebuah benteng. Namun, kaum priyai meminta kembali rumah-rumah mereka, lalu

⁹ Jeroen Peeters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo: Perubahan Religijs di Palembang (1821- 1942)*, h. 10

rumah-rumah kayu tersebut didirikan kembali di Kampung 27-28 ilir yang berdekatan dengan keraton. Dengan pembongkaran istana, lenyap pula kebudayaan Palembang, korban pertama dari perkembangan ini adalah pengetahuan bahasa dan sastra Jawa di kalangan priyai. Sesudah keraton jatuh, tidak ada alasan lagi untuk memakai bahasa Jawa sebagai bahasa etiket dan seremoni. Dengan pengasingan Sultan Mahmud Badaruddin, maka menghilang pula pelindung lama sastra Jawa. Dalam waktu satu generasi, pemakaian bahasa Jawa dikalangan priyai tinggal kenagan saja.¹⁰

Jadi, sesudah pengambil alihan kekuasaan oleh pemerintah kolonial, perlahan-lahan mulai diberlakukan proses mobilisasi sosial bagi kaum ningrat yang tidak dapat dielakan. Dalam laporan kolonial kita berkali-kali menemukan kisah priyai yang jatuh miskin, yang berusaha mati-matian memelihara keadaan sosial mereka.¹¹ Dalam kondisi sosial masyarakat para ulama rakyat diantaranya K.H. Abubakar Bastari benar-benar memahami keadaan masyarakat Palembang kegiatan pembinaan sosial dilakukan dengan cermat dan hati-hati agar masyarakat benar-benar memahami wejangan-wejangan (nasehat-nasehat) yang diberikan oleh para ulama *independen* benar-benar suatu perjuangan yang cukup menggetarkan dan menggugah hati. Baik ulama *Birokrat* maupun ulama *Rakyat* memiliki jalannya masing-masing dalam dakwah, ada yang mementingkan dan memperkaya dirinya, ada pula yang lebih menyukai ilmunya bermanfaat bagi orang banyak, ada diantara

¹⁰ *Ibid.*, h.12

¹¹ *Ibid.*, h. 13-14

mereka yang suka mengucilkan diri demi mencapai tujuan, ada yang lebih suka aktif di tengah-tengah masyarakat ramai.

Dalam hal ini K.H. Abubakar Bastari termasuk ulama yang aktif dan membaaur bersama masyarakat, ini dikarenakan kondisi sosial masyarakat yang mengkhawatirkan pada waktu itu. Sebab kurang lebih pada tahun 1821 pecahlah perang antara Belanda dengan Kesultanan Palembang Darussalam, dimana akhirnya Sultan Mahmud Badaruddin II mengalami kekalahan dan akhirnya diasingkan. Di dalam peperangan ini tidak sedikit alim ulama yang gugur di medan laga. Selang dari beberapa tahun kemudian, akhirnya penjajahan Belanda pun berjalan dengan baik, dari segi ekonomi hingga kehidupan keagamaan masyarakat. Karena, selain melakukan kolonisasi, pemerintahan Belanda juga melakukan kristenisasi terhadap masyarakat, fenomena inilah yang membangkitkan dan menggerakkan hati para ulama untuk mengayomi masyarakat dalam perbaikan mental dan spiritual yang terkikis oleh keadaan. Dengan berbekal ilmu yang beliau miliki dari pelajaran yang diperoleh dari Madrasah Sholatiyah, K.H. Abubakar Bastari mengajarkan kembali ilmu agama Islam yang pernah diajarkan oleh ulama-ulama sebelum beliau semasa berguru di tanah Arab. Dalam upaya perbaikan sosial masyarakat, beliau bersama ulama setingkatnya, seperti Ki. Kms.H. Abdullah Azhari (Ki. Pedatuan) dalam organisasi MUII, menjaga kerukunan masyarakat antara paham tradisional dan reformis.

C. Bidang Ekonomi

Posisi Palembang sebagai kerajaan maritim yang berada dalam jalur percaturan dengan berbagai negara telah melibatkan Palembang dalam hubungan “*sekutu*” dan “*seteru*”, dan juga dalam kaitan “*overlord*” dan “*vassal*”. Dengan berbagai kerajaan baik yang bersifat internal kerajaan Palembang maupun yang eksternal dengan kerajaan-kerajaan lain. Persaingan perdagangan telah menyebabkan pusat-pusat kekuasaan tersebut saling bergantian menjadi “*sekutu*” dan “*seteru*”. Sistem analisis tidak stabil, merupakan salah satu tema yang menetap. Tema lain yang bermain diantara kerajaan-kerajaan nusantara adalah keterlibatan masing-masing dalam mata rantai pertuanan (*overlordship*) dan vassal yang biasa diwujudkan dengan sebagian yang membawa upeti untuk mempersembahkan dalam waktu-waktu tertentu.¹² Suatu kekuasaan atau negara dapat dikatakan dalam stabilitas makmur apabila kondisi perekonomian suatu negara tidak mengalami defisit atau mengalami krisis moneter. Untuk meningkatkan suatu stabilitas makmur maka sistem perekonomian menggunakan alat penggerak ekonomi masyarakat yang dinamakan pasar. Sistem perekonomian yang digunakan pada kolonial Hindia-Belanda melanjutkan sistem perekonomian Kesultanan Palembang Darussalam, untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat adalah menggunakan sistem perdagangan. Sejarah perekonomian di Indonesia dengan sistem perdagangan dimulai pada masa Kerajaan Sriwijaya.

¹² Husni Rahim, *Sistem Otoritas & Administrasi Islam: Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, h. 47

Kerajaan Sriwijaya adalah suatu kerajaan pantai negara perniagaan, negara yang berkuasa di laut, kekuatan dan kekayaan disebabkan oleh perdagangan Internasional melalui Selat Malaka. Jadi, berhubungan dengan jalan raya perdagangan Internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa.¹³ Jalan tersebut selama lima belas abad mempunyai arti penting dalam sejarah. Kerajaan Sriwijaya adalah pusat perdagangan penting yang pertama di Indonesia, dengan mengadopsi sistem perdagangan pada masa keemasan Kerajaan Sriwijaya. Kesultanan Palembang Darussalam menjadikan diri sebagai kerajaan maritim yang berkuasa di laut. Perekonomian yang stabil menciptakan suatu pergerakan ekonomi perdagangan yang makmur.

Perdagangan diadakan dengan pulau Jawa, Bangka, Negeri Cina, Riau, Singapura, Pulau Penang, Malaka, Lingga dan Negeri Siam. Disamping itu pulau-pulau lain datang dengan perahu membawa dan mengambil barang dagangan. Barang dagangan berupa, kain linen, kain cita Eropa dan juga barang-barang dari Cina seperti sutera, benang emas, panic, besi, pecah belah, obat-obatan, teh, manisan dan barang-barang lain.¹⁴ Barang dagangan yang penting lainnya adalah minyak kelapa dan minyak kacang (dari Jawa dan Siam), gula jawa, bawang, asam, beras, gula pasir, besi, baja, barang-barang kelontongan dan sebagainya.¹⁵ Barang dagangan dari Kesultanan Palembang Darussalam yang di ekspor keluar negara diantaranya berupa, rotan ikat,

¹³ RZ. Leirissa, G.A. Ohorella dan Yuda B. Tangkilisan, *Sejarah Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Defit Prima Karya, 1996), h. 16-17

¹⁴ Pemerintah Provinsi Daerah Tk.1 Sumatera Selatan, *Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II Pahlawan Kemerdekaan Nasional*, h. 24

¹⁵ *Ibid.*, h. 25

dammar, kapur barus, kemenyan, kayu lako, lilin, gading dan pasir emas, barang tersebut merupakan hasil bumi yang berasal dari hutan dan tepian sungai. Selain itu barang ekspor yang di peroleh melalui pertanian berupa lada, kopi, tebu, gambir, pinang, tembakau dan nila, terdapat barang lain juga seperti ikan kering dan ikan asin, barang pecah belah, tikar rotan dan jerami, karung, barang dari kuningan, songket, dan lain tenunan.¹⁶

Hubungan dagang Kesultanan Palembang Darussalam juga terjalin dengan negara-negara Eropa seperti Belanda dan Inggris. Awalnya bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia hanya untuk mengambil langsung rempah-rempah yang pada masa itu menjadi barang dagang internasional yang sangat dibutuhkan. Sehingga para pedagang yang tergabung dalam VOC.¹⁷ dan EIC.¹⁸ masing- masing berusaha untuk memperoleh hak monopoli dagang, dengan melakukan perjanjian terhadap para penguasa di daerah-daerah yang kaya dengan rempah- rempah.¹⁹

Setelah pemerintah kesultanan Palembang runtuh, seluruh aspek kegiatan diambil alih oleh Belanda dan salah satunya dalam bidang perekonomian, seluruh hasil-hasil bumi Palembang di monopoli secara besar-besaran. Kesultanan Palembang memiliki wilayah yang cukup luas mencakup

¹⁶ *Ibid.*, h. 26

¹⁷ VOC (*Vereenigde Oostindische Compaigne*) Merupakan Parusahaan Kantor Dagang Milik Belanda yang juga Milik Swasta. Lihat di I Wayan Badrika, *Sejarah Nasional Indonesia dan Umum*. (Jakarta: Erlangga, 1996), h. 53

¹⁸ EIC (*East India Company*) Merupakan Perusahaan Dagang Milik Inggris yang juga Milik Swasta. Lihat di I Wayan Badrika, *Sejarah Nasional Indonesia dan Umum*, (Jakarta: Erlangga, 1996), h. 53

¹⁹ *Ibid.*, h.10

Sumatera Bagian Selatan. Bagi rakyat yang memiliki kebun atau pun ladang, apabila datang panen maka hasil kebun atau ladang mereka tersebut dibayar dengan harga yang sangat murah, dan terkadang tidak sesuai dengan biaya pemupukannya. Bagi rakyat yang tidak memiliki apa-apa atau disebut golongan rendah maka untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya mereka mencari kayu-kayu bakar untuk dijual dan terkadang mereka juga menjala ikan di sungai yang hasilnya nanti separuh untuk dijual dan separuhnya lagi untuk dimakan sendiri.

Dalam menghadapi kenyataan ini masyarakat hanya bisa bersabar dan bertawakal kepada Allah SWT. Pada paruh kedua abad ke-19 Palembang bukan lagi khas keraton, sebagai hak istimewa terakhir keturunan sultan, masih berhak untuk memakai kopiah yang dihiasi bordiran benang emas dan selanjutnya mereka dibebaskan dari perkerjaan wajib di Kampung mereka. Di depan umum para priyai masih mencoba mempertahankan kedudukan mereka namun di balik topeng sosial ini sering bersembunyi kehidupan yang miskin. Begitu juga kegiatan ekonomi di kalangan priyai amat dihalangi dengan anggapan bahwa pekerjaan fisik adalah suatu penghinaan; bahkan pemakaian tenaga kerja budak, yang semula masih tersedia, dianggap sebagai degradasi sosial. Di kalangan priyai, pandangan ini tentu cepat mengalami perubahan akibat tekanan ekonomi. Pada paruh kedua abad ke-19 telah banyak priyai terpaksa mencoba untuk hidup dari penghasilan kerajinan tangan, seperti pembuatan keris, songket dan benda ukiran gading, suatu pekerjaan yang diam-diam dapat dilakukan di dalam rumah, tanpa harus mengorbankan

martabat tinggi para priyai di depan umum.²⁰

Dalam peraturan agraria tahun 1870, semua tanah yang bukan milik pribumi dinyatakan sebagai tanah domein (*domein van de staat*), ini disebut juga tanah bebas sedangkan tanah yang dikuasai rakyat pribumi juga disebut tanah bebas. Disini dinyatakan pula bahwa penyewa adalah warga negara Belanda yang ada di Nederland atau Hindia Belanda atau kepada perusahaan yang terdaftar di Hindia Belanda. Maksimum areal yang disewa 500 bau dengan sewa antara f.1. sampai f.6.. Tanah pribumi yang dikuasai berdasarkan hukum adat hanya dapat disewa selama lima tahun, sedangkan tanah milik mereka untuk dua puluh tahun, selanjutnya perjanjian harus terdaftar. Suatu akibat dari peraturan itu adalah bahwa ada kecendrungan menjadikan status tanah yang disewakan berubah, sehingga berstatus milik yang menyewakan. Peraturan agraria ini berlaku juga untuk semua kolonial Belanda yang berkuasa di Palembang termasuk Palembang itu sendiri.²¹ Perkembangan ekonomi kesultanan pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin II yang ditopang pada maju pesatnya tambang timah di pulau Bangka dan ekspor lada dari pedalaman Palembang menjadikan Palembang pelabuhan menarik, sebagai tempat tinggal pedagang dari sebelah lautan. Akibatnya pada akhir zaman kesultanan, jumlah orang Arab yang menetap di Palembang telah mencapai jumlah 500 orang lebih. Pelabuhan Palembang merupakan pendatang Arab sebagai mitra baru dalam berniaga dan mereka mendapat

²⁰ Jeroen Peeters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo: Perubahan Religijs di Palembang 1821- 1942*, h.14

²¹ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia baru: 1500-1900 dari Emporium Sampai Emporium Jilid 1*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1937), h. 331

fasilitas yang khusus dari Sultan Palembang yang antara lain memperbolehkan pedagang Arab membangun gudang mereka di darat dan juga di lingkungan keraton. Orang Arab dari Hadramaut mempunyai kedudukan khusus, orang Belanda yang pernah mengunjungi Keraton Palembang menyaksikan, bahwa jika pembesar kerajaan menghadap Raja, mereka harus menyembah sampai menyentuh lantai, sedangkan orang Arab boleh duduk di kursi di sisi sultan.²²

D. Bidang Keagamaan

Ulama sebagai pemuka agama sangat diperlukan pendapatnya oleh masyarakat untuk memecahkan berbagai masalah yang bersangkutan dengan hukum Islam. Masyarakat yang dalam keadaan kekosongan ilmu agama, sangat perlu diperhatikan. Dalam hal ini ulama merupakan faktor penting sebagai pemberi fatwa yang memberikan ketentuan tentang suatu masalah yang berkaitan dengan agama. Fatwa tersebut diberikan ulama bila ada pertanyaan yang banyak dari masyarakat, kemudian fatwa diumumkan, kepada masyarakat luas untuk diketahui dan dilaksanakan. Fatwa ini sering memiliki pengaruh besar dalam masyarakat, karena itu ia dijadikan media komunikasi untuk menerapkan suatu hal dalam masa kolonial. Fatwa ini sangat ditakuti oleh Belanda karena dapat memicu kebangkitan perlawanan terhadap kekuasaan Belanda.

Selain sebagai pemberi fatwa, ulama juga bisa bertindak sebagai

²² *Ibid.*, h. 15

musyawir atau juru rembuk. Bila terjadi perselisihan pendapat antara berbagai pihak yang sulit dipertemukan maka penghulu sering diminta bantuan untuk mendamaikan dan sebagai juru rembuk, ulama tentunya bertindak secara adil, tidak merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini kehidupan sosial masyarakat dapat berimbang, selalu terjadi keselarasan antara masyarakat, bila masyarakat kebingungan dalam membayar zakat, maka ulama bertugas membantu mengumpulkan dan membagikan zakat kepada orang yang sangat membutuhkan. Lagi-lagi ulama sangat diperlukan kemampuannya, dalam membantu masyarakat memecahkan kesulitan-kesulitan mereka.²³

Dimasa kolonial juga, penghulu dengan para pegawainya adalah pelaksana program dan kebijaksanaan pemerintah Belanda, penghulu dengan para pegawainya adalah pelaksana program dari kebijaksanaan pemerintah Belanda. Penghulu disini bersifat pasif yang artinya seluruh kegiatannya telah ditentukan dan diatur serta diawasi oleh pemerintahan kolonial Belanda. Ketergantungan penghulu pada pemerintahan kolonial tinggi sekali, karena pengangkatan dan pemberhentian ditetapkan oleh pejabat Belanda tidak ada wewenang yang dilimpahkan kepada pangeran penghulu, sebagaimana dimasa kesultanan. Oleh karena itu, maka syarat utama calon penghulu adalah harus loyal dan tidak fanatik.²⁴ Tentunya kehidupan keagamaan masyarakat menjadi mengambang, Selain itu Belanda juga mengadakan gerakan-gerakan kristenisasi, mereka sedikit demi sedikit, memperkenalkan

²³ Halimatussa'diyah, " *Peran Ki Marogan dalam Mengembangkan Islam di Palembang, skripsi*, (Palembang, Jurusan SKI Fak. Adab IAIN Raden Fatah), h. 52-53. Tidak diterbitkan.

²⁴ Husni Rahim, *Sistem Otoritas & Administrasi Islam: Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, h. 83

kebudayaan mereka, politik kristenisasi mereka disebut *zending* atau *missie*.²⁵ Dimanapun Belanda memiliki daerah kolonial atau kekuasaan, mereka pasti memasukan program kristenisasi tersebut. Palembang yang juga merupakan daerah jajahan baru, merupakan tempat yang strategis untuk melancarkan gerakan kristenisasi tersebut.

Di sisi lain, dari berbagai laporan Belanda abad ke-19, banyak ditemukannya keterangan, bahwa penduduk Palembang masih banyak yang belum beragama, sembahyang Mingguan mereka lakukan bukan pada hari Jum'at tetapi pada hari Rabu. Potret suasana keagamaan di daerah Palembang begitu menarik, disatu sisi agama Islam merupakan nama resmi Kesultanan dan adanya juga lembaga keagamaan. Di sinilah masih bisa kita lihat tingkat pengamalan agama Islam orang Palembang masih kurang mendalam. Oleh karena itu, tidaklah heran bila para pejabat Belanda di Palembang, masih merasa ragu atas tingkah laku mereka yang di anggap berbeda dengan kebiasaan orang Islam. Keadaan tersebut mencerminkan lembaga keagamaa penghulu belum berfungsi dengan baik, atau memberi gambaran, kurangnya ulama yang dapat mempengaruhi tingkah laku penduduk.²⁶ Maka para ulama seperti K.H. Abubakar bastari dan Ulama Rakyat lainnya berusaha memberikan pembelajaran agama islam baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media langgar atau musholah dan majelis-majelis ta'lim.

²⁵ Marwati Djoened Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. 1992), h. 28

²⁶ Husni Rahim, *Sistem Otoritas & Administrasi islam: Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, h. 54-55

Dalam perkembangannya pada masa kolonial Hindia Belanda acap kali terdapat kebijakan-kebijakan yang kontropersi, seperti halnya dalam perihal pendidikan. Belanda membuat ordonasi guru pada sekolah-sekolah baik sekolah Belanda.

Perlakuan ordonasi guru dikarenakan pemerintah kolonial Hinda Belanda sudah tidak sanggup lagi membiayai sekolah-sekolah yang didirikan Belanda. Kesempatan ini, dipergunakan oleh para ulama untuk membentuk sekolah yang berbasis madrasah yang pembiayaannya secara mandiri atau bersifat swadaya. Sekolah-sekolah inilah harapan masyarakat kelas bawah atau para pribumi yang ekonominya lemah dalam mengenyam pendidikan formal.

Maka salah satu ulama yang berda'wah melalui media madrasah adalah K.H. Abubakar Bastari dengan hasil dari musyawarah para ulama Palembang, maka ditunjuklah K.H. Abubakar Bastari sebagai Direktur utama Madrasah Nurul Falah yang berlokasi di 30 Ilir Palembang.

Pada mulanya pemerintah kolonial Hindia Belanda memberikan izin pendirian madrasah-madrasah yang didirikan oleh para ulama. Namun, seiring berjalannya waktu pemerintah Belanda mulai khawatir terhadap aktivitas madrasah yang semakin hari dirasa semakin menumbuhkan rasa nasionalisme pada masyarakat pribumi melalui pengaruh pendidikan Agama Islam yang diterapkan pada kurikulum Madrasah.

Maka pemerintah kolonial Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan baru perihal kurikulum madrasah-madrasah yang ada di Palembang.

Kebijakan itu diantaranya adalah aturan terhadap guru yang mengajar pelajaran Agama Islam haruslah dipilih oleh pemerintah Belanda melalui Raat Agama atau orang pribumi yang menjadi pejabat pemerintah pada masa itu. Maka kurikulum pendidikan Agama Islam dibatasi dengan cara memasukan pelajaran Bahasa Belanda, pelajaran kebudayaan Belanda yang lebih banyak jam pelajarannya dari pada pelajaran Agama Islam.

Pada puncaknya pemerintah kolonial Hindia-Belanda sempat membuat aturan baru terhadap pendidikan pada madrasah, yaitu menghapus pelajaran Agama Islam. Akan tetapi, K.H. Abubakar Bastari tetap mengajarkan pelajaran Agama Islam di madrasahnyanya secara diam-diam. Dan berkat kegigihannya dalam mengembangkan pendidikan Islam tercetaklah para alumni madrasah Nurul Falah menjadi seorang penda'wah hebat di Palembang dan di beberapa wilayah Sumatera Selatan.

Kemudian K.H. Abubakar Bastari bersama para ulama seluruh Indonesia bahu-membahu mewujudkan cita-cita luhur yaitu mendirikan sebuah Perguruan Tinggi Islam Sumatera Selatan yang kelak akan menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang dan sekarang telah bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.